

PENYULUHAN MONEY POLITIC BAGI MASYARAKAT DESA DANGIN PURI KAJA DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024

Faradita Putri Aura Maharani¹,
Adie Wahyudi Oktavia Gama^{2*}

¹) Program Studi Ilmu Komunikasi,
Universitas Pendidikan Nasional

²) Program Studi Teknologi Informasi,
Universitas Pendidikan Nasional

Article history

Received : 6 Maret 2024

Revised : 11 Maret 2024

Accepted : 11 Mei 2024

*Corresponding author

Adie Wahyudi Oktavia Gama

Email :

adiewahyudi@undiknas.ac.id

Abstrak

Praktik politik uang masih menjadi permasalahan besar dalam menghadapi Pemilu 2024. Merebaknya kasus politik uang dikhawatirkan akan menciptakan banyak pejabat publik yang korupsi dan merusak kualitas demokrasi. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang enggan menolak politik uang secara tegas. Hal tersebut dikarenakan minimnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai politik uang. Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan edukasi serta kesadaran masyarakat terkait politik uang perlu dilakukan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang dalam menghadapi Pemilu 2024. Metode kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan mulai dari observasi, persiapan, menyebarkan brosur dan kuisisioner ke banjar-banjar, serta evaluasi. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari – 1 Maret 2024 di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Hasil dan analisis menunjukkan, kegiatan program kerja ini berhasil mengedukasi partisipan sejumlah 15 orang mengenai pengertian, bentuk politik uang, dampak, hukumnya, dan meningkatkan kesadaran untuk menolak politik uang secara tegas.

Kata Kunci: Desa Dangin Puri Kaja; Pemilu 2024; Politik Uang

Abstract

The practice of money politics is still a big problem in facing the 2024 elections. It is feared that the outbreak of money politics will create many corrupt public officials and damage the quality of democracy. In reality, there are still many people who are reluctant to firmly reject money politics. This is due to the lack of education and public awareness about money politics. Based on these findings, increasing education and public awareness regarding money politics is necessary. The purpose of this community service activity is to increase public awareness to reject money politics in facing the 2024 elections. The method of community service activities is carried out through counseling, starting from observation and preparation to distributing brochures and questionnaires to banjars, and evaluation. This community service was carried out from January 15 to March 1, 2024, in Dangin Puri Kaja, Denpasar, Bali. The results and analysis showed that this work program activity succeeded in educating 15 participants about the definition, forms, impacts, and laws of money politics, and in raising awareness to reject money politics firmly.

Keywords: Dangin Puri Kaja Village; Election 2024; Money Politic

Copyright © 2024 Faradita Putri Aura Maharani & Adie Wahyudi Oktavia Gama

PENDAHULUAN

Pemilu atau pemilihan umum adalah bentuk nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk ikut serta secara langsung dalam memilih pejabat publik (Amir, 2020). Pemilu menjadi pilar terpenting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kemajemukan dan masyarakatnya yang heterogen (Pakaya et al., 2022). Selain menjadi sarana kedaulatan, Pemilu menjadi bentuk representasi masyarakat dalam memilih pemimpin yang baik dan bijaksana. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi "politikus - politikus" yang akan mewakili dan mengemban suara rakyat didalam lembaga perwakilan (Kuntag et al., 2023). Namun dalam penyelenggaraannya, Pemilu tidak terlepas dari masalah dan kritikan terutama terkait anggaran kampanye yang mahal. Setiap calon pemimpin membutuhkan modal yang sangat besar untuk berkampanye dan menarik simpati masyarakat. Alhasil, calon

pemimpin sanggup melakukan apa saja, bahkan dengan cara yang salah demi melaksanakan kampanye seperti politik uang.

Politik uang atau *money politic* adalah usaha melangsungkan suap kepada pemilih dengan cara memberikan sejumlah uang ataupun jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuar tersebut (Mardiah & Zitri, 2023). Politik uang menjadi salah satu sumber praktik yang dapat menciptakan korupsi politik (Pahlevi & Amrullohi, 2020). Adelina (2019) juga memaparkan bahwa penyebab atau potensi dari praktik korupsi politik adalah uang yang digunakan untuk praktik jual beli suara pemilih. Sehingga politik uang dipahami sebagai upaya menyuap seseorang untuk mempengaruhi pilihannya yang dapat menghasilkan praktik korupsi. Politik uang mengiringi proses pemilihan dari mulai tingkat nasional, provinsi, hingga pemilihan tingkat desa (Atthahara et al., 2023). Maka dari itu, politik uang menjadi permasalahan yang cukup besar di Indonesia. Seperti yang diketahui, apabila pemilu dihasilkan dari tindakan kotor hanya akan menghasilkan calon yang tidak berkualitas pula (Ranggong et al., 2023). Saat calon pemimpin melakukan perilaku politik uang pada masa pemilihan, maka biaya politik menjadi tinggi. Akibatnya, pemimpin yang terpilih tidak lagi mementingkan tanggung jawabnya bagi kepentingan masyarakat, melainkan melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan modal biaya pemilihan (Arqon et al., 2024). Terpilihnya pemimpin yang salah pada ujungnya hanya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.

Pemilihan umum yang seharusnya menjadi sarana kedaulatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin, justru menjadi wadah awal mula praktik korupsi. Maraknya politik uang dalam berbagai pemilihan di Indonesia, memberikan persepsi yang buruk terhadap demokrasi di negeri ini (Kurniawan & Hermawan, 2019). Satria (2019) menyebutkan adapun bentuk-bentuk korupsi politik uang mencakup pembelian suara dengan uang, menjanjikan hadiah atau posisi khusus, pemaksaan, intimidasi atau dalam bentuk lainnya (Kurniawan et al., 2023). Terdapat empat hal penting yang perlu digaris bawahi terkait dengan politik uang, yaitu *vote buying* atau membeli suara, *vote broker* atau orang atau sekelompok orang yang mewakili kandidat membagikan uang atau barang, uang atau materi yang dipertukarkan dengan suara, dan pemilih yang menjadi sasaran politik uang (Abdurrohman, 2021). Disebutkan juga oleh Abdurrohman (2021) bahwa imbas yang terjadi akibat praktik politik uang, yakni melahirkan manajemen pemerintahan yang korupsi, terpidana politik uang rata-rata adalah masyarakat biasa yang tidak menjadi bagian penting dalam pemilu atau tim sukses, serta politik uang dapat merusak paradigma bangsa Indonesia. Sayangnya, bagi sebagian besar peserta pemilu, politik uang seolah menjadi syarat wajib untuk menang, sedang bagi sebagian besar pemilih, politik uang menjadi suatu praktek yang wajar dan tidak bisa dihindari (Anggraini et al., 2023).

Menuju pesta demokrasi Pemilu 2024, politik uang menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi. Lembaga Survei Populi Center meluncurkan hasil survei nasional pada 9 November 2023 terkait kekhawatiran terbesar jalannya pemilihan umum 2024, yaitu politik uang dengan presentase 37,2% (Rahmawaty, 2023). Data tersebut diperkuat dengan presentase tindakan masyarakat dalam menghadapi praktik politik uang. Sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, memaparkan dimana sebesar 56,82% responden menerima penawaran, 18,4% menerima penawaran dengan terpaksa, 19,16% menolak dengan halus, dan sejumlah 5,62% menolak dengan tegas (Shafina, 2023). Tentunya ini menjadi isu yang harus diperhatikan dalam menghadapi pemilu 2024. Politik uang yang seringkali terjadi dalam proses pemilu, mengancam integritas suatu proses politik yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat (Amatahir, 2023). Hal tersebut terjadi disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah minimnya pengetahuan di masyarakat mengenai politik uang beserta dampaknya di masa mendatang.

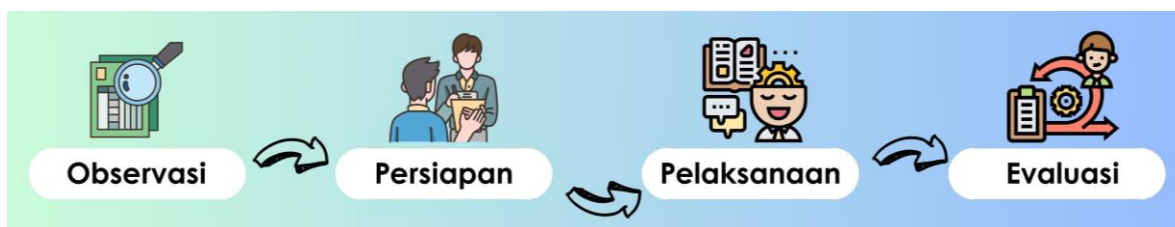
Tak dapat dipungkiri, menuju ajang krusial Pemilu 2024, tentunya perlu ada upaya untuk mencegah praktik politik uang dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemilih harus diberikan penjelasan dan pengetahuan secara berkelanjutan mengenai bahaya jual beli suara, dampak melambungnya biaya pemenangan pemilu, dan bahaya dari korupsi (Sjafrina, 2020). Karena ini akan menjadi babak penentu serta awal baru bagi masa depan Indonesia. Pemberian edukasi dapat dilakukan mulai dari lingkup kecil seperti di desa. Jupri et al., (2023) menyebutkan bahwa desa adalah entitas terkecil dengan kedudukannya yang strategis sehingga menjadi

sasaran utama perilaku politik berbasis uang atau *money politic*. Maka dari itu, sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat serta mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, peneliti melakukan penyuluhan mengenai *money politic* kepada masyarakat di Desa Dangin Puri Kaja.

Desa Dangin Puri Kaja adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebesar 13.000 jiwa yang terbagi ke dalam 8 (delapan) dusun atau banjar. Dengan demikian, penyuluhan dilakukan ke banjar-banjar yang bertujuan untuk memberikan edukasi *money politic* terhadap masyarakat Desa Dangin Puri Kaja dalam menghadapi Pemilu 2024. Penyuluhan terkait politik uang ini menjadi salah satu program kerja yang diangkat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan ini berfokus untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait politik uang. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Dangin Puri Kaja dengan metode pendekatan diskusi secara langsung untuk dapat memahami permasalahan. Adapun tahapan dari program kerja pengabdian kepada masyarakat, yaitu:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar pada periode kali ini, dilaksanakan pada 15 Januari–1 Maret 2024 di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Secara keseluruhan tahap kegiatan program kerja ini berlangsung dari tanggal 16 Januari – 20 Februari 2024. Berikut rincian berlangsungnya kegiatan pengabdian yang telah terlaksana.

Tabel 1. Tanggal Kegiatan Pengabdian

No	Tanggal Pelaksanaan	Tahap
1	16 – 20 Januari 2024	Tahap Observasi
2	20 Januari – 3 Februari 2024	Tahap Persiapan
3	3 – 4 Februari 2024	Tahap Pelaksanaan
4	5 – 20 Februari 2024	Tahap Evaluasi

Penyuluhan dilaksanakan secara langsung di banjar-banjar Desa Dangin Puri Kaja yang dihadiri oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), kepala Dusun/Banjar, serta masyarakat. Diharapkan setelah penyuluhan ini, edukasi dan kesadaran partisipasi mengenai politik uang semakin meningkat dalam menghadapi Pemilu 2024. Akhir kegiatan program kerja diakhiri dengan evaluasi melalui kuisioner untuk mengukur keberhasilan. Adapun luaran yang dihasilkan, yaitu berupa brosur yang berisi informasi tentang politik uang (*money politic*).

HASIL PEMBAHASAN

Tahap Observasi

Tahap awal dari kegiatan ini adalah observasi yang bertujuan untuk memahami dan memperoleh gambaran permasalahan secara menyeluruh. Observasi dilakukan tidak hanya memperhatikan permasalahan

di Desa Dangin Puri Kaja, melainkan juga masalah nasional yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Tahap pengamatan dilakukan dengan mengumpulkan dan memetakan data-data yang sesuai untuk menjadi dasar menyimpulkan permasalahan. Hasil observasi menemukan bahwa kekhawatiran terbesar di masyarakat untuk menyambut Pemilu 2024 adalah kasus politik uang dan masih banyaknya masyarakat yang menerima bentuk suap tersebut.

Kenyataannya, permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya edukasi masyarakat mengenai *money politic*. Sehingga, dalam program kerja ini, penulis merancang untuk melakukan penyuluhan bagi masyarakat Desa Dangin Puri Kaja untuk meningkatkan edukasi serta kesadaran praktik politik uang terutama di masa-masa kampanye. Dari informasi yang telah dikumpulkan dan survei lokasi, terdapat 8 (delapan) banjar di Desa Dangin Puri Kaja yaitu: 1) Banjar Tainsiat, 2) Banjar Kalanganyar, 3) Banjar Karang Sari, 4) Banjar Umasari, 5) Banjar Bhuwana Sari, 6) Banjar Taman Sari, 7) Banjar Lumbung Sari, 8) Banjar Kaliungu Kaja.

Tahap Persiapan

Sesuai dengan hasil observasi, penyuluhan dilakukan dengan mengangkat permasalahan mengenai politik uang. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pengetahuan sehingga kesadaran masyarakat mengenai praktik politik uang semakin meningkat. Hal ini menjadi upaya guna menghadapi praktik politik uang dalam ajang Pemilu 2024. Maka dari itu, tahap persiapan dilakukan dengan membuat brosur tentang politik uang yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat Desa Dangin Puri Kaja. Kuisisioner juga dibuat untuk menjadi tolak ukur keberhasilan program kerja yang akan diisi oleh masyarakat sesuai penyuluhan.



Gambar 2. Bentuk Brosur

Tahapan persiapan ini juga mencakup permohonan izin dilakukan kepada ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta kepala dusun/banjar untuk melaksanakan kegiatan program kerja. Adapun sesi diskusi dilakukan terlebih dahulu untuk menginformasikan materi penyuluhan, rencana dan teknis pelaksanaan program kerja. Tahap persiapan bertujuan untuk mematangkan segala aspek sebelum pelaksanaan agar berjalan lancar dan menjalin kerjasama yang kuat dari berbagai pihak bersangkutan serta masyarakat.



Gambar 3. Diskusi Bersama Ketua PPS dan Kepala Dusun/Banjar

Tahap Pelaksanaan

Pada pelaksanaannya, seluruh anggota kelompok terbagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang dengan topik yang berbeda. Setiap kelompok akan bertugas memberikan penyuluhan ke masing – masing banjar di Desa Dangin Puri Kaja. Tahap pelaksanaan penyuluhan diarahkan pada edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap politik uang. Kegiatan penyuluhan berlangsung di banjar dengan melibatkan pengurus banjar, ketua PPS serta masyarakat Desa Dangin Puri Kaja yang hadir. Kegiatan diawali dengan menyapa langsung masyarakat yang berada di banjar sembari menjelaskan maksud dan tujuan penyuluhan. Kemudian, memberikan brosur serta menjelaskan materi tentang pengertian, dampak, bentuk politik uang, dan hukumnya. Program ini diterima dengan baik oleh masyarakat yang dapat dilihat dari antusiasme membaca informasi pada brosur dan mengajukan pertanyaan seputar politik uang. Setelah penyuluhan, partisipan mengisi kuisisioner sebagai pengukur keberhasilan program kerja.



Gambar 4. Tahap Pelaksanaan (a) Penyuluhan (b) Pengisian Kuisisioner (c) Foto Bersama Partisipan

Evaluasi

Akhir tahap dari program kerja ini yakni evaluasi oleh penulis atas penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat Desa Dangin Puri Kaja mengenai *money politic*. Evaluasi dilakukan dengan mengamati proses pelaksanaan di lapangan saat penyuluhan serta hasil pengisian kuisisioner yang telah dikumpulkan. Hasil data tersebut akan diolah dan dibedakan dalam setiap indikator untuk mengukur keberhasilan program kerja dan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah penyuluhan.

Program kerja penyuluhan *money politic* bagi masyarakat di Desa Dangin Puri Kaja berhasil memberikan edukasi pada 15 orang partisipan dari 8 banjar. Dari kuisisioner yang telah diisi kemudian diolah menjadi data untuk memudahkan penilaian. Berikut tabel hasil evaluasi yang telah dirangkum dan diolah:

Tabel 2. Hasil Evaluasi Pengabdian

No	Indikator	Sebelum Penyuluhan	Sesudah Penyuluhan
1	Memahami pengertian politik uang (<i>money politic</i>)	Terdapat 4 orang yang sudah memahami dan 11 orang belum memahami.	Terdapat 14 orang sudah memahami dan 1 orang masih belum memahami.
2	Mengetahui modus politik uang (<i>money politic</i>)	Terdapat 5 orang yang sudah memahami dan 10 orang yang belum memahami.	Terdapat 13 orang yang sudah memahami, 2 orang yang belum memahami.
3	Memahami dampak politik uang (<i>money politic</i>)	Terdapat 5 orang yang sudah memahami dan 10 orang yang belum memahami.	Terdapat 14 orang yang sudah memahami dan 1 orang yang belum memahami.
4	Mengetahui sanksi dari praktik politik uang (<i>money politic</i>)	Terdapat 3 orang yang mengetahui dan 12 orang yang belum mengetahui.	Terdapat 15 orang yang mengetahui.
5	Menolak dengan tegas politik uang (<i>money politic</i>)	Terdapat 13 orang yang tidak menolak dengan tegas dan 2 orang yang berani menolak tegas.	Terdapat 15 orang yang berani menolak tegas.

Berdasarkan pengamatan langsung serta pengolahan kuisisioner yang telah diisi oleh 15 partisipan, kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan hasil yang signifikan. Seperti pada tabel hasil, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah masyarakat Desa Dangin Puri Kaja yang awalnya belum paham menjadi paham tentang politik uang setelah dilakukannya penyuluhan. Demikian juga setelah penyuluhan, kesadaran masyarakat Desa Dangin Puri Kaja untuk menolak politik uang secara tegas juga meningkat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Dangin Puri Kaja telah terlaksana dengan baik dan lancar. Penyuluhan ini dilakukan guna menambah edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik uang dalam menghadapi Pemilu 2024. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini mampu serta berhasil memberikan edukasi lebih dan meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Dangin Puri Kaja untuk menolak praktik politik uang dengan tegas. Hal tersebut dapat diamati dari hasil evaluasi sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan. Maka dari itu, diharapkan masyarakat di Desa Dangin Puri Kaja menjadi lebih kritis dalam menolak politik uang. Diharapkan juga, dari penyuluhan ini bisa mengurangi angka praktik politik serta mencegah terpilihnya calon pemimpin yang korupsi. Sehingga kualitas demokrasi dan proses politik seperti pemilu di Indonesia terjaga, demi melahirkan pemimpin bangsa yang bijaksana dan bertanggung jawab. Program kerja ini tentunya masih memiliki keterbatasan, yaitu sulit untuk membuktikan penolakan praktik politik uang secara langsung oleh masyarakat. Sehingga pengukuran dilakukan menggunakan kuisisioner.

PUSTAKA

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2), 142–159. <https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia>
- Adelina, F. (2019). *BENTUK-BENTUK KORUPSI POLITIK*. <https://pilkada.tempo.co/read/1068154/ppatk-temukan-1-066-transaksi-mencurigakan-terkait->
- Amatahir, Z. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu. *Jurnal Media Hukum*, 11(2), 87–98. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577>

- Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>
- Anggraini, T., Abram Situmorang, D., Situmorang, L., Zawani, N., & Ivanna, J. (2023). Peran Bawaslu dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilu 2024 di Kota Medan. In *Jurnal Pendidikan Multidisipliner* (Vol. 6).
- Arqon, M., Mustafa, D., & Gogon, M. (2024). Pencegahan Politik Uang di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Hukum E-ISSN* (Vol. 2, Issue 1). <https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium>
- Atthahara, H., Faizal Rizki, M., Nayiroh, L., Widyodaru Saputro, N., Kartika, Y., Jabbar Wafi, A. (2023). SOSIALISASI BAHAYA POLITIK UANG DI DESA KEDUNGGAYA, KECAMATAN CIBUAYA, KABUPATEN KARAWANG. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 6(4): 1380–1384. <https://doi.org/10.31604/jpm.v6i4.1380-1384>
- Jupri, Rais, S., Haritsa, Aliyas, & Hiola, R. Y. (2023). Desa Anti Politik Uang (Money Politik) sebagai Strategi Antisipasi Pilkada Curang Tahun 2024 Provinsi Gorontalo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(4), 1185. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i4.1508>
- Kuntag, R. C., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). Upaya pengawas BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politi Uang (Money Politic) Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 6(1).
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 29–41. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>
- Kurniawan, R. R., Wahyuni, S., & Rahmawati, N. (2023). Politik Uang Dalam Pemilu 2019: Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik Pada Masyarakat Kelurahan Dompok Tanjungpinang. *INNOVATIVE: Jurnal of Social Science Research*, 3(2), 9179–9192.
- Mardiah, F., & Zitri, I. (2023). PENGARUH PRAKTIK POLITIK UANG TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA KOTA MATARAM. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 78–92.
- Pahlevi, M. E., & Amrullohi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1>
- Pakaya, R., Katili, Y., & Latuda, F. (2022). PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. *JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH*, 1(2), 181–193. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>
- Rahmawaty, L. (2023, November 9). *Survei:37,2 Persen Responden Khawatir Terjadi Politik Uang Saat Pemilu*. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/3815964/survei372-persen-responden-khawatir-terjadi-politik-uang-saat-pemilu>
- Ranggong, A. M. A., Abidin, Z., & Uksan, A. (2023). POLITIK UANG DAN RISIKO KORUPSI YANG MENGANCAM PERTAHANAN NIRMILITER. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 11(2), 145–149. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4231>
- Shafina, G. (2023, July 15). *Praktik dan Persepsi Masyarakat Perihal Politik Uang*. GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/gammashafina/praktik-dan-persepsi-masyarakat-perihal-politik-uang-tLJ7Z>
- Sjafrina, A. (2020). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 43–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>

Format Sitasi: Maharani, F.P.A. & Gama, A.W.O. (2024). Penyuluhan *Money Politic* Bagi Masyarakat Desa Dangin Puri Kaja Dalam Menghadapi PEMILU 2024. *Reswara. J. Pengabdian. Kpd. Masy.* 5(2): 580-587. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v5i2.4335>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))